STRATEGI OPTIMALISASI PENDANAAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T: TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS

Alicia Anggraini¹⁾, Aulia Putri Ferdianna²⁾, Karisma Dewi³⁾, Wikoyatur Rofikhoh⁴⁾,
Aulia Prima Kharismaputra⁵⁾

Universitas Negeri Semarang

aliciaanggraeni7@gmail.com¹ auliaputriferdianna@gmail.com²

karismadewi276@gmail.com³ wikoyaturlmtpt@gmail.com⁴

Abstract (English)

In an effort to realize equitable education quality and access in Indonesia, this research investigates methods to optimize education funding in 3T areas, which stands for "Frontier, Outermost, and Disadvantaged". One of the main problems hindering the achievement of equitable education rights is the inequality in the provision of facilities, infrastructure and educators in the 3T areas. This study uses the literature review method to explore the literature related to the geographical, social and economic challenges affecting education in the 3T areas and the government's efforts to address these issues through funding policies, infrastructure development and teacher capacity building. The results show that methods such as increasing flexibility in the use of BOS funds, government cooperation with the private sector and scholarship programs can improve access to education in the 3T areas. However, to implement the policies, stronger cooperation and stricter supervision between central, regional and local governments are needed to address the current inequalities. In conclusion, to support the development of excellent and competitive human resources around the world, it is crucial to optimize education funding creatively and effectively.

Article History

Submitted: 30 Desember 2024

Accepted: 5 Januari 2025

Published: 6 Januari 2025

Key Words

Financing, Education, 3T Areas

Abstrak (Indonesia)

Dalam upaya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan akses di Indonesia, penelitian ini menyelidiki metode untuk mengoptimalkan pendanaan pendidikan di wilayah 3T, yang merupakan singkatan dari "Terdepan, Terluar, dan Tertinggal". Salah satu dari masalah utama yang menghambat pencapaian hak pendidikan yang merata adalah ketimpangan dalam penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di wilayah 3T. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi literatur terkait tantangan geografis geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pendidikan di daerah 3T, serta upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan pendanaan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kemampuan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode seperti meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS, kerja sama pemerintah dengan sektor swasta, dan program beasiswa dapat meningkatkan akses pendidikan di wilayah 3T. Namun, untuk menerapkan kebijakan, dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat antara pemerintah pusat, daerah, dan lokal untuk mengatasi ketimpangan saat ini. Kesimpulannya, untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di seluruh dunia, sangat penting untuk mengoptimalkan pendanaan pendidikan secara kreatif dan efektif.

Sejarah Artikel

Submitted: 30 Desember 2024

Accepted: 5 Januari 2025

Published: 6 Januari 2025

Kata Kunci

Pembiayaan, Pendidikan, Daerah 3T

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen krusial bagi sebuah negara karena dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dan unggul, sehingga menciptakan masyarakat yang produktif untuk kemajuan bangsa. Yulius (2020) juga menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam menentukan arah suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu tujuan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan." Namun, kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia, yang sangat luas dan beragam, dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk tantangan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Ketidaksetaraan dalam kondisi pendidikan di daerah 3T bukanlah hal baru. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018), kondisi pendidikan di daerah 3T sangat berbeda dibandingkan dengan di kota-kota besar dan negara tetangga yang tidak jauh jaraknya. Misalnya, di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik dan sering dilengkapi dengan asrama untuk siswa. Guru-guru yang ditugaskan di sana adalah tenaga muda yang kompeten dan mendapatkan gaji yang pantas. Contoh nyata dapat dilihat di SMPN 3 Tempurejo di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana kondisi pendidikan sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana pendidikan di sana belum memadai, dengan kurangnya ruang kelas penting, koleksi buku di perpustakaan yang terbatas, dan alat praktikum yang tidak cukup. Selain itu, jumlah guru hanya empat orang untuk 51 siswa, yang menyebabkan beban mengajar yang berlebihan dan mengurangi efektivitas kegiatan belajar mengajar (Ulfa, 2023).

Masalah pendidikan di daerah 3T sangat beragam, seperti kurangnya jumlah guru, fasilitas yang tidak memadai, dan perbedaan faktor geografis dibandingkan dengan daerah perkotaan, yang terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Wahidah dan Istiyono (2020) menyatakan bahwa tantangan geografis merupakan salah satu kendala utama dalam keberlanjutan pendidikan di daerah 3T. Kendala ini mencakup minimnya akses transportasi, perjalanan yang sulit melalui jembatan yang rusak, sungai, atau bahkan lautan, serta jarak yang jauh menuju sekolah. Mahmudah dan Putra (2021) menambahkan bahwa masalah lain dalam proses pembelajaran meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak, dan kurangnya motivasi siswa. Selain itu, banyak guru yang diangkat sebagai PNS di daerah 3T memilih untuk pindah ke kota karena berbagai alasan, termasuk pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah-masalah ini, mengingat pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945.

Pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan dari berbagai aspek, termasuk tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana pendukung proses belajar di sekolah. Kurikulum pendidikan dirancang untuk bersifat fleksibel, agar materi yang diajarkan dapat mengikuti perubahan dalam masyarakat dan lingkungan pendidikan (Rozi & Aminullah, 2021). Untuk pengembangan tenaga pendidik, berbagai pelatihan telah dilaksanakan guna menciptakan guru yang profesional. Wardhani dan Krisnani (2020) menyatakan bahwa evaluasi pelatihan seharusnya tidak hanya dilakukan sekali, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan di wilayah masing-masing, termasuk dalam pengaturan pembiayaan pendidikan (Purba et al., 2024). Pembiayaan pendidikan mencakup pengelolaan dana, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Dengan demikian, sumber pendanaan pendidikan bagi lembaga pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi dari masyarakat atau orang tua siswa. Namun, masih terdapat masalah dalam realisasi pembiayaan pendidikan. Menurut Dewi Oktaviani, seorang Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa meskipun pemerintah mengatur alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, distribusi dana tersebut tidak selalu merata di berbagai daerah. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil seringkali menerima dana yang kurang untuk memenuhi

kebutuhan dasar pendidikan, seperti infrastruktur dan pelatihan bagi guru. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi optimalisasi pendanaan pendidikan di daerah 3T.

KAJIAN TEORI DAN TELAAH LITERATUR

a. Pendidikan

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuan pendidikan adalah membentuk kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, karakter yang baik, kecerdasan, moralitas, serta keterampilan yang berguna bagi individu dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya meliputi pengajaran keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek yang lebih dalam seperti penyampaian pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak.

Dalam arti luas, pendidikan meliputi seluruh pengalaman belajar yang terjadi sepanjang hayat, baik dalam lingkungan formal maupun informal, yang berdampak positif pada perkembangan individu. Konsep ini dikenal sebagai *long life education*. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan didefinisikan sebagai proses yang dilaksanakan di lembaga pendidikan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi, pengetahuan, dan kesadaran sosial, sehingga mereka mampu memahami hubungan sosial serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Ujud et al., 2023).

b. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan fokus utama dalam pengembangan sumber daya manusia di banyak negara, termasuk Indonesia. Pendidikan dipandang sebagai investasi dalam pengembangan modal manusia yang perlu terus ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai inisiatif sehingga semua lapisan masyarakat, baik yang berada di kota maupun di desa, dapat mengakses pendidikan secara setara dan adil (Sihombing, 2023).

c. Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Pendidikan berkualitas dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Meski demikian, biaya pendidikan seringkali menjadi (Sutansyah & Ramdani, 2023).

Kendala bagi sebagian orang untuk menikmati hak mereka atas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan pendidikan secara efektif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Berbagai metode pendanaan pendidikan meliputi; 1) Pendanaan Publik: Pemerintah menyediakan anggaran untuk institusi pendidikan negeri, seperti sekolah dan universitas. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa atau bantuan finansial bagi siswa yang membutuhkan. 2) Pendanaan Swasta: Perusahaan dan organisasi sering mendukung pendidikan melalui program pendanaan atau beasiswa, termasuk yang dirancang untuk karyawan atau keluarga mereka. Organisasi nirlaba juga berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan melalui berbagai program donasi. 3) Pendanaan Pribadi: Individu dapat membiayai pendidikan mereka sendiri atau keluarga mereka melalui tabungan atau pinjaman

pendidikan. Pendekatan yang beragam ini bertujuan untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang tersedia.

d. Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan

Pengalokasian dana khusus oleh pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan salah satu langkah strategis dalam mendistribusikan anggaran secara efektif dan merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup individu di berbagai daerah. Studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pemerataan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh (Sihombing, 2023).

e. Implementasi Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata "*policy*" yang dalam bahasa Inggris merujuk pada sebuah rencana yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan keputusan dari berbagai pihak, seperti pemerintah atau partai politik. Secara etimologis, istilah kebijakan juga memiliki akar kata dari bahasa Yunani yang berarti "kota," mencerminkan sifat kebijakan sebagai bagian dari pengelolaan kehidupan bersama.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah yang ada di sektor tersebut. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan antara tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan implementasi di lapangan. Proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai secara efektif.

Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk merealisasikan rencana kebijakan. Hasil dari implementasi tersebut diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, diperlukan beberapa tahapan, pendekatan, dan langkah-langkah strategis agar kebijakan dapat berhasil diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat demi tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas (Sari et al., 2021).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Faruqi & Dwi (2022) yang berjudul "*Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia*" menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 3T, terutama Papua. Papua menjadi provinsi dengan jumlah daerah 3T terbanyak di Indonesia, dengan berbagai kendala, termasuk rendahnya aksesibilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi, dan minimnya sarana prasarana pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua hanya mencapai 60,62%, jauh di bawah rata-rata nasional, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi kebijakan.

Tenaga pendidik di Papua sebagian besar belum tersertifikasi, dengan hanya 7% guru yang memenuhi kualifikasi resmi. Selain itu, sarana pendidikan seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan fasilitas sekolah masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan angka partisipasi murni (APM) yang rendah, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Puncak. Sementara itu, kota seperti Jayapura menunjukkan APM yang lebih tinggi, mencerminkan adanya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti meningkatkan pelatihan dan sertifikasi guru, menyediakan insentif bagi pendidik yang bersedia mengabdikan diri di daerah terpencil, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan secara merata. Dengan implementasi kebijakan yang efektif dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas pendidikan di Papua dapat meningkat, mendukung pemerataan pendidikan, dan mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis studi kajian pustaka (literature review). Metode kajian pustaka ini meliputi kegiatan, mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka berupa buku dan jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan topik penelitian (Azmi Agustina et al., 2024). Menurut buku yang ditulis oleh (Rashid, 2022) literatur review merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk mengumpulkan informasi dan temuan riset yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendidikan antara daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Masalah ini tidak hanya menyangkut ketidakadilan akses, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pemerintah telah mengidentifikasi masalah ini sebagai prioritas, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alat utama untuk mengatasi kesenjangan. Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meskipun tantangan struktural masih menjadi penghambat.

Tantangan Utama Pendidikan di Daerah 3T

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa (2023) di daerah 3T tepatnya di SMPN 3 Tempurejo Kab. Jember menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan antara pendidikan di daerah 3T dengan di wilayah perkotaan itu terbukti berbeda. Hal ini bisa dilihat mulai dari sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut yang belum memadai, jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang sangat kurang serta faktor aksesibilitas dan kondisi sosial yang berdampak pada kualitas dari siswanya. Penelitian yang dilakukan oleh (et al., 2022) yang berjudul "*Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia*" juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 3T, terutama Papua yakni rendahnya aksesibilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi, dan minimnya sarana prasarana pendidikan. Hal ini juga diperkuat dalam Falah dan Hadna (2022) yang menyebutkan bahwa terdapat enam masalah utama pendidikan di daerah 3-T selama pandemi, diantaranya adalah sulitnya internet dan alar komunikasi untuk pembelajaran daring, keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kurang memenuhinya kualitas pendidik yang tersedia, minimnya jumlah pendidik/tenaga kependidikan, dan sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tantangan utama pendidikan di daerah 3T meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik, sulitnya aksesibilitas, serta keterbatasan ekonomi.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Banyak sekolah di daerah 3T dalam kondisi memprihatinkan, dengan bangunan yang rusak, kurangnya ruang kelas, dan minimnya

buku serta media pembelajaran. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang jauh dari ideal, mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa.

2. Minimnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Pendidik Daerah 3T sering menghadapi kesulitan dalam menarik tenaga pengajar berkualitas. Guru-guru enggan ditempatkan di lokasi terpencil karena minimnya insentif dan fasilitas pendukung. Akibatnya, kualitas pengajaran menjadi rendah dan jumlah pendidik pun tidak mencukupi kebutuhan.
3. Sulitnya Akses Infrastruktur Infrastruktur jalan yang buruk dan medan sulit, seperti sungai, tanah berlumpur, atau jembatan rusak, mempersulit siswa untuk mencapai sekolah. Dalam banyak kasus, siswa harus berjalan jauh setiap hari, yang meningkatkan angka putus sekolah.
4. Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa terkadang menyulitkan mereka untuk memenuhi kepemilikan teknologi. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya karena memilih untuk bekerja. Masalah kesenjangan ini juga muncul sebagaimana diungkap seperti dari penelitian Muhajir (2020), Rudagi & Siska (2021), Ulfiaturrohmah et al. (2021), dan Widyasari, et al. (2022).

Upaya Peningkatan Akses Pendidikan

Untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan suatu lembaga selama periode tertentu. Melalui anggaran, dapat terlihat berbagai aktivitas yang direncanakan. Anggaran umumnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan bergantung pada jumlah dana yang diterima lembaga dari berbagai sumber, seperti pemerintah, orang tua, masyarakat, atau sumber lainnya. Sementara itu, pengeluaran mencakup alokasi dana untuk berbagai komponen yang memerlukan pembiayaan pendidikan (Purba et al., 2024). Untuk mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia, pengalokasian anggaran yang tepat untuk suatu daerah harus diperhatikan, terutama untuk daerah yang termasuk dalam daerah 3T. Anita (politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI) mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan untuk daerah 3T harus berbeda dengan daerah lainnya mengingat banyaknya persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah 3T. “Saya mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan, nanti kita tekankan untuk prioritas pembiayaan pendidikan di daerah 3T dengan daerah lain harus berbeda,” ujarnya (Koran Timor, 2024). Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan akses pendidikan di daerah 3T antarlain:

1. Pembangunan dan renovasi infrastruktur APBN telah dialokasikan untuk membangun sekolah baru dan merenovasi sekolah yang ada di daerah 3T. Penyediaan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya, program Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mendanai proyek infrastruktur pendidikan di banyak wilayah terpencil.
2. Program beasiswa dan transportasi pendidikan. Pemerintah menyediakan beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selain itu, penyediaan transportasi bagi siswa yang harus menempuh jarak jauh juga telah menjadi bagian dari kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Peningkatan Kompetensi Guru Pemerintah meluncurkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru di daerah 3T. Program seperti Guru Garis Depan (GGD) membantu menempatkan tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil, meskipun masih membutuhkan penguatan dalam skala dan pelaksanaannya.
2. Penyediaan Buku dan Teknologi Pendidikan Distribusi buku dan bahan ajar yang relevan dengan kurikulum nasional didukung oleh APBN. Selain itu, investasi dalam teknologi seperti komputer dan akses internet bertujuan mengatasi keterbatasan sumber daya lokal. Penggunaan *e-learning* mulai diperkenalkan untuk memperluas cakupan pembelajaran.
3. Program Sekolah Terpadu APBN juga mendukung inisiatif pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pelatihan vokasional. Program ini membantu siswa di daerah 3T memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kesiapan mereka untuk dunia kerja.

Strategi Pendanaan yang Inovatif

Pengelolaan biaya yang efektif sesuai dengan kebutuhan dana sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang dengan cara terbaik (Purba et al., 2024, hlm. 64). Anggaran memiliki beberapa fungsi, termasuk:

1. Memberikan garis besar biaya dan waktu untuk kegiatan yang akan dilakukan;
2. Memberikan wewenang untuk melaksanakan rencana; dan
3. Berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan menilai kegiatan.

Dalam penelitian Purba et al. (2024), biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah dapat dipengaruhi oleh bererapa faktor, antaralain:

1. Kenaikan biaya
2. Perubahan relatif dalam gaji guru
3. Perubahan dalam populasi dan rasio siswa yang hadir di sekolah negeri
4. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah
5. Peningkatan standar pendidikan
6. Peningkatan tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di daerah 3T, Kemendikbudristek mengungkapkan berbagai strategi-strategi yang dilakukan melalui program-program yang sudah dan akan dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim dalam wawancara di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada tahun 2021, mengungkapkan beberapa hal berikut

1. Relaksasi Dana BOS. Menteri Pendidikan telah memprioritaskan pendanaan di daerah 3T yakni dengan memberikan kisaran dana BOS yang 50% bahkan 100% lebih besar dari daerah lain serta memberikan kebebasan kepada kepala sekolah di daerah 3T untuk menggunakan dana BOS secara fleksibel. Dana tersebut dapat digunakan untuk menggaji guru honorer, membeli perlengkapan seperti laptop, atau mendukung ekonomi guru. Kebijakan ini memberikan otonomi lebih kepada sekolah untuk menangani kebutuhan spesifik mereka.
2. Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah mendorong kerja sama dengan sektor swasta untuk membangun infrastruktur pendidikan. Skema ini telah membantu mempercepat pembangunan di daerah terpencil, meskipun implementasinya membutuhkan pengawasan yang ketat.
3. Pendanaan Berbasis Hasil Model ini memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mencapai target pendidikan tertentu, seperti peningkatan angka partisipasi

sekolah. Pendekatan ini bertujuan mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan.

Untuk mencapai pemerataan pendidikan, diperlukan adanya konsep efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan berarti memiliki kaitan antara optimalisasi sumber daya pendidikan yang terbatas dengan hasil yang tinggi. (Purba et al., 2024). Upaya efisiensi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, anataralain efisiensi internal dan efisiensi eksternal.

1. Efisiensi internal sistem pendidikan dianggap efisiensi internal jika dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan biaya yang minimal. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dapat memaksimalkan output yang diharapkan dengan input tertentu. Biaya pendidikan harus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi internal. Berbagai jenis kebijakan, seperti:
 - a. Mengurangi biaya operasional
 - b. Memprioritaskan anggaran untuk komponen input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar
 - c. Meningkatkan kapasitas ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya Meningkatkan kualitas PBM
 - d. Meningkatkan keinginan guru untuk bekerja lebih banyak
 - e. Meningkatkan rasio guru-murid
2. Efisiensi eksternal istilah efisiensi eksternal biasanya dikaitkan dengan metode analisis keuntungan biaya, gaji dan total biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan digunakan untuk menentukan rasio antara keuntungan keuangan sebagai hasil pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan, Fattah (2006:43) menetapkan garis besar aturan berikut:
 - a. Kesempatan yang sama untuk memasuki sekolah
 - b. Peluang untuk bertahan di sekolah
 - c. Mencapai prestasi akademik
 - d. Menikmati manfaat pendidikan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia, ketimpangan pendidikan di wilayah 3T merupakan masalah besar untuk pemerataan pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, dan akses yang sulit karena infrastruktur yang kurang memadai adalah masalah utama yang dihadapi. Situasi menjadi lebih buruk karena faktor ekonomi masyarakat yang rendah, yang menghambat anak-anak di wilayah 3T untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan anggaran pendidikan, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur adalah upaya pemerintah yang telah dilakukan, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Kendala yang harus segera ditangani termasuk distribusi sumber daya yang tidak merata dan rendahnya keinginan karyawan untuk mengajar.

Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan tindakan strategis yang mencakup pengoptimalan penggunaan dana pendidikan, pengelolaan SDM yang efektif, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan akses ke pendidikan, dukungan teknologi juga dapat dimanfaatkan. Berkolaborasi antara masyarakat, Pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk keberhasilan dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerataan pendidikan di wilayah 3T dapat dicapai melalui kerja sama yang sinergis, yang mendukung tujuan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing di tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi Agustina, lu, Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Syarif Hidayatullah, U., & Masyithoh Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur. *Jip*, 2(6), 903–913.
- Faruqi Tutukansa, A., & Dwi Tuffahati, E. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 84–92. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art4>
- Sari, I. M., Dewi, F. A., Fadila, N., & Rivadah, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Uu No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98–103. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.552>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Sutansyah, L., & Ramdani, A. (2023). Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 221–226. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197>
- Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>
- Akbar, J. S., Manado, U. N., Trimadona, E., Muh, A., & Saputra, A. (2023). *LANDASAN PENDIDIKAN (Teori dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era* (Issue November).
- Asep Sukenda Ekok, M. P., and M. P. Andrian Gandhi Wijanarko. 2019. *Profesi Kependidikan*. CV. Pilar Nusantara.
- Dewi, R., Usman, T., Rusmayani, N. G. A. L., Lubis, W., Putri, P. R. A., Dewi, K. A. K., AR, F., Utama, A. A., Nuryanti, D., & others. (2024). *DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN*. CV. Intelektual Manifes Media. https://books.google.co.id/books?id=_6otEQAAQBAJ
- Iqbal, Muhammad, Alfiq Rizki, Julia Sapira Wardani, Nanda Putri Khafifah, Nurhasanah Silitonga, and Ridha Amirah. 2023. “Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar.” *Journal on Education* 5(2):2257–65. doi: 10.31004/joe.v5i2.878.
- Indramayu, S. M. K. N., Gatot, J., No, S., Indramayu, K., Indramayu, K., & Barat, J. (2023). *Pengaruh kebijakan merdeka belajar dan manajemen pembiayaan terhadap mutu pembelajaran smkn di eks kewedanaan indramayu*. 6(1).
- Jaelani, Jaelani, and Kusna Djati Purnama. 2022. “Manajemen Biaya Dan Kinerja Strategis Dalam Supply Chain.” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4(2):192–219.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Model pendidikan daerah 3T berbasis kearifan lokal*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Koran Timor. (2024). Anita Gah minta biaya pendidikan di daerah 3T harus dibedakan. *Koran Timor*. Diakses dari <https://www.korantimor.com/lintas-nusa/1544684714/anita-gah-minta-biaya-pendidikan-di-daerah-3t-harus-dibedakan>.
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Muhammad, N., Muhajir, N., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5, 4684–4689.
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika pembiayaan pendidikan di sekolah. *Nizhāmiyah*, 14(1), 64–79. ISSN: 2086-4205.
- Purwitasari, Nina, and Hadi Samanto. 2022. “Pengaruh Biaya Pendidikan , Biaya Promosi , Biaya Sarana e-ISSN 2809-8862 Terhadap Jumlah Murid Baru Di Yayasan Pendidikan

- p-ISSN 2086-3306 Alazhar Solobaru . Pendidikan Al Azhar Solo Baru Menginduk Ke Yayasan Pesantren Indonesia Al Azhar Yang Azhar Solo Baru Yang Terletak Di Jl Raya Solo Baru Baki Kudu Baki Sukoharjo . Dengan.” 13(2):45–56.
- Putra, Yudiarto Perdana, and Kartika Yuliari. 2017. “Jurnal Nusamba Vol.2 No.1 2017.” 2(1):47–56.
- Rashid, F. (2022). Buku Metode penelitian Fathor Rasyid.
- Syabhana, A., Asbari, M., Anggitia, V., & Andre, H. (2024). *Revolusi Pendidikan : Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan*. 03(02), 27–30.
- Tulungagung, A. R., & Muzakki, H. (2023). *Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Meningkatkan Daya Saing Mahasiswa di UIN Sayyid*. 4(2), 165–184.
- Ulfa, M. (2023). Marginalisasi pendidikan siswa di daerah 3T: Studi kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i1.13>
- Yudianto, U. C. B. P. D. A. J. R. L. A. N. K. N. N. N. R. R. D. T. E. D. T. R. A. S. H. Y. Y. Y. M. F. H., and M. Hidayat. 2023. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Overview Implementasi Pembiayaan Pendidikan Di Satuan-Satuan Pendidikan*. Penerbit P4I.
- Yulius, M. (2020). Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Sarana dan Prasarana Pada SMK Negeri 1 Singkawang. *Khazanah Pendidikan: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 246–255.
- Zahro', N. U. A. 2022. *Merdeka Belajar Konsep, Kebijakan Dan Praktik Berdasarkan " Sense Making Perspective " Kognisi Guru*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).